

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui komparasi pembingkai pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua pada media *online* Kompas.com dan Jubi Papua periode Februari 2025. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua media membingkai pemberitaan terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh masyarakat dan pelajar di Papua. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan gaya pembingkai kedua media dalam menyajikan masalah, penyebab penolakan, penilaian moral terhadap penolakan tersebut, serta rekomendasi solusi yang diberikan dalam pemberitaan yang mereka publikasikan pada periode yang sama. Berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua media membahas isu yang sama, mereka memiliki perspektif yang berbeda dalam membingkai penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis di Papua.

Kompas.com mendefinisikan penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai masalah kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Kompas.com menggambarkan bahwa penolakan terjadi karena masyarakat belum memahami manfaat program tersebut. Penolakan ini dilihat sebagai masalah komunikasi yang bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan edukasi intensif. Kompas.com lebih menekankan bahwa penolakan adalah respons yang wajar apabila masyarakat tidak paham, namun mereka juga mengingatkan bahwa penolakan yang mengganggu hak orang lain untuk menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis adalah hal yang tidak bisa dibenarkan.

Di sisi lain, Jubi Papua membingkai penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai masalah ketidakcocokan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan lokal di Papua. Jubi menganggap bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis bersifat *top-down*, yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan mengabaikan kondisi sosial dan budaya Papua. Jubi lebih menekankan bahwa penolakan ini

muncul karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar di Papua, seperti pendidikan gratis dan perbaikan sarana pendidikan. Masalah utama yang dibingkai oleh Jubi adalah kebijakan yang tidak peka terhadap permasalahan lokal dan ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat.

Kompas.com mendiagnosis penyebab penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Kompas.com melihat bahwa penolakan terjadi karena masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup tentang program Makan Bergizi Gratis, dan solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan edukasi, komunikasi, dan transparansi. Kompas.com tidak menggali penyebab yang lebih mendalam, tetapi lebih fokus pada kurangnya sosialisasi sebagai penyebab utama.

Sementara itu, Jubi Papua mendiagnosis penyebab penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai akibat kebijakan yang diterapkan secara top-down, tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua. Jubi menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak relevan dengan kondisi lokal karena lebih mengutamakan pembangunan gizi ketimbang pendidikan yang lebih dibutuhkan. Selain itu, Jubi menyoroti pengurangan anggaran Otsus yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan di Papua sebagai faktor yang memperburuk ketidakpuasan masyarakat. Jubi Papua menilai bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi penyebab utama ketidakpuasan terhadap Makan Bergizi Gratis.

Kompas.com memberikan penilaian moral yang lebih netral dengan menilai bahwa penolakan Makan Bergizi Gratis adalah hal yang wajar jika disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat, tetapi juga menekankan bahwa penolakan yang menghalangi hak orang lain untuk menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kompas.com menggambarkan Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan pemerintah yang baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dan menyarankan agar penolakan diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik.

Jubi Papua, di sisi lain, memberikan penilaian moral yang lebih kritis terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Jubi menilai penolakan Makan Bergizi

Gratis adalah hak yang sah bagi masyarakat dan pelajar, karena mereka merasa bahwa program ini tidak adil dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Jubi juga menyoroti intimidasi aparat terhadap demonstrasi pelajar sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan memperlihatkan simpati terhadap perjuangan pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan keadilan sosial. Jubi dengan tegas mendukung hak masyarakat untuk menentang kebijakan yang mereka anggap merugikan dan tidak sesuai dengan kondisi lokal.

Kompas.com merekomendasikan pendekatan persuasif dan edukasi untuk mengatasi penolakan Makan Bergizi Gratis. Kompas.com menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai tujuan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menolak. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik untuk menjelaskan manfaat program kepada masyarakat, dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Sebaliknya, Jubi Papua merekomendasikan evaluasi atau penghentian program Makan Bergizi Gratis, dengan mengalihkan anggaran untuk pendidikan gratis dan peningkatan sarana pendidikan di Papua. Jubi menekankan bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Papua dibandingkan program gizi. Mereka juga merekomendasikan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk penambahan jumlah guru, agar kebutuhan pendidikan di Papua dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Kedua media sepakat bahwa penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua adalah masalah yang penting yang perlu diselesaikan, dan keduanya mengakui pentingnya pendidikan. Baik Kompas.com maupun Jubi Papua juga menyoroti peran pemerintah dalam menjelaskan dan melaksanakan kebijakan ini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Kedua media juga menyarankan solusi yang melibatkan komunikasi yang lebih baik dan evaluasi program.

Kompas.com lebih menekankan pada pendekatan komunikasi yang lebih efektif, melihat penyebab utama penolakan sebagai ketidaktahuan masyarakat, dan menawarkan solusi berupa pendekatan persuasif dan sosialisasi lebih intensif. Di sisi lain, Jubi Papua menganggap penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai akibat dari kebijakan yang top-down dan tidak memperhatikan kebutuhan lokal, serta

kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jubi mendorong pengalihan anggaran untuk pendidikan dan evaluasi kebijakan Makan Bergizi Gratis, dengan fokus pada keadilan sosial dan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Selain itu, isu penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua masih dianggap sebagai isu minor, baik oleh media nasional maupun lokal. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan kedalaman pemberitaan adalah nilai berita *proximity*. Jubi Papua, sebagai media lokal, memiliki kedekatan geografis, psikologis, dan kultural dengan masyarakat Papua. Selain itu, latar belakang Jubi sebagai media yang berawal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat mereka lebih sensitif terhadap isu-isu keadilan sosial dan hak masyarakat adat. Hal ini membuat *framing* yang dibangun Jubi lebih kritis, tajam, dan sarat konteks lokal, dibandingkan Kompas.com yang memiliki orientasi nasional dan lebih berhati-hati dalam membingkai konflik yang melibatkan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan media, kedekatan dengan audiens, dan orientasi redaksional sangat memengaruhi bagaimana suatu isu dibingkai dalam pemberitaan. Kompas.com, sebagai media nasional, membingkai isu dengan cara yang lebih selaras dengan narasi pemerintah. Sementara itu, Jubi Papua, sebagai media lokal dengan akar advokasi, membingkai isu secara lebih kritis dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat. Analisis *framing* tidak hanya membantu melihat isi pemberitaan, tetapi juga membuka ruang untuk memahami posisi ideologis dan struktur kekuasaan yang membentuk cara media menyampaikan realitas sosial.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut yang membandingkan pembedaan pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis di media-media lain, seperti media televisi atau media sosial, untuk

melihat apakah terdapat perbedaan dalam cara media nasional dan lokal membingkai isu serupa di berbagai platform.

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis wacana kritis untuk lebih mendalam menganalisis bagaimana media nasional (seperti Kompas.com) dan media lokal (seperti Jubi Papua) mewacanakan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan ketidakadilan sosial dan pengabaian terhadap kebutuhan lokal, yang tercermin dalam program-program sosial pemerintah.

5.2.2 Saran Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat mendorong keterlibatan media lokal di Papua dan media lainnya dalam mengangkat permasalahan penolakan terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis, serta memberikan lebih banyak ruang bagi suara masyarakat Papua untuk didengar dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai pentingnya keberpihakan media pada isu-isu pendidikan dan kesejahteraan sosial yang lebih mendesak di Papua, serta mendorong evaluasi kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Selain itu, media juga diharapkan dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa keputusan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan.